

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DENGAN NPWP PADA UKM HEN'S FOOD, KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG, DEPOK.

**Sutardi, S.E., M.M.¹, Rudy, S.E., M.M.², Sutarti, S.E., M.M.³, Ir. Sri Purwati., M.M.⁴,
Marshanda Angelica⁵**

^{1, 2,3,4} Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

⁵ Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

Korespondensi : sutardi@stiebi.ac.id

ABSTRAK.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memadankan NIK dengan NPWP pada UKM Hen's Food Perumahan Villa Pertiwi, Jl. Masjid Anuriah Blok S1 No. 5 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok. Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan menggunakan metode *exploration*, yaitu dengan cara menggali satu atau beberapa aspek khusus terhadap suatu topik yang telah ditentukan oleh Tim Penyaji. Kemudian mendiskusikannya, mempelajari, mencari alternatif solusinya, serta mengevaluasi. Selain itu juga digunakan metode *sharing of ideas* dan *prosedure two ways dialogue*, yaitu suatu diskusi yang selaras dengan memberikan pandangan-pandangan di mana seluruh peserta dapat ikut berpartisipasi sehingga kegiatan PKM dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan kegiatan PKM yang dilaksanakan diperoleh hasil bahwa, UKM Hen's Food Perumahan Villa Pertiwi, Jl. Masjid Anuriah Blok S1 No. 5 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok. dapat menerima materi serta saran yang dipaparkan oleh para Tim PKM dengan baik. Hal ini terlihat dari para peserta sudah berhasil memadankan NIK dengan KTP dan sudah valid. Selanjutnya dalam sesi tanya jawab dan berdiskusi secara aktif terhadap materi yang disajikan.

Kata Kunci: Pemadanan NIK dan NPWP.

ABSTRACT.

This Community Service (PKM) activity aims to socialize and match NIK with NPWP at Hen's Food UKM Villa Pertiwi Housing, Jl. Masjid Anuriah Block S1 No. 5 Sukamaju Village, Cilodong District, Depok. The method of implementing PKM is carried out using the exploration method, namely by digging one or several special aspects of a topic that has been determined by the Presenting Team. Then discuss it, study, find alternative solutions, and evaluate. In addition, the method of sharing of ideas and procedural two-way dialogue is also used, which is a discussion that is in harmony with providing views in which all participants can participate so that PKM activities can run effectively. Based on the PKM

activities carried out, the results were obtained that Hen's Food UKM Villa Pertiwi Housing, Jl. Masjid Anuriah Block S1 No. 5 Sukamaju Village, Cilodong District, Depok. can receive the material and suggestions presented by the PKM Team well. This can be seen from the participants who have successfully matched the NIK with the ID card and it is valid. Furthermore, in a question and answer session and actively discuss the material presented.

Keywords: NIK and NPWP matching

PENDAHULUAN.

Pemadanan NIK dengan NPWP merupakan salah satu Program pemerintah untuk warga negara baik ASN maupun Non ASN, sehingga dengan adanya pemadanan ini nantinya NIK akan digantikan dengan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan NIK menjadi NPWP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah (PMK-112) diterbitkan sebagai reformasi aturan perpajakan terkait penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga negara Indonesia. Warga negara asing, badan, dan Instansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP yang digunakan hingga saat ini.

PMK-112/PMK.03/2022 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2022 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur penggunaan format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan peraturan tersebut tentunya kedepan akan lebih mudah pelaksanaan perpajakan.

Program pemerintah tersebut harus didukung salah satunya adalah UKM Hen's Food yang berada di perumahan Villa Pertiwi Blok S1 No. 5 Rt 9, RW. 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Hen'S Food ini memproduksi Bawang Goreng, Aneka Kripik, Kacang Goreng, Sambel Pecel dan aneka kuliner. Mulai dari pengurusan perijinan, Ijin Edar, Sertifikat Halal dan Hak Paten semua difasilitasi oleh Pemerintah Kota Depok Gratis. Hasil produknya sudah beredar diberbagai Koperasi, Super Market seperti Deco' mart, Farmer Market Sejabodetabek.

Berdasarkan program tersebut maka kami Tim PKM STIE Bisnis Indonesia ingin melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian

kepada Masyarakat (PKM). Dengan tema "Sosialisasi Pemadanan NIK dengan NPWP". Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para pengelola UKM di Kelurahan Sukamaju khususnya Hen's Food dapat lebih memahami cara pemadanan NIK dengan NPWP tersebut.

MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya para wajib pajak belum mengetahui dan memahami masalah pemadanan NIK dengan NPWP
2. Banyaknya wajib pajak yang belum lapor pajak
3. Belum tahu cara memadankan NIK dengan NPWP

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Bagaimana cara menjelaskan kepada wajib Pajak khususnya Hen's Food tentang pentingnya pemadanan NIK dengan NPWP?
2. Bagaimana tata cara memadankan NIK dengan NPWP?

KAJIAN PUSTAKA.

NIK.

Kepres No 96 tahun 2018 Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. PP Nomor 24 tahun 2018, Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Selanjutnya Perpres Nomor 26 tahun 2009, Nomor Induk Kependudukan, (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Perpres No 83 Tahun 2021 Nomor Induk Kependudukan, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuarikan di atas, maka NIK dapat dijelaskan adalah Nomor identitas diri yang melekat pada diri seseorang yang terdaftar resmi

sebagai penduduk Indonesia.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Pengertian NPWP menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP ini dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sementara dijelaskan dalam pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Setiap Wajib Pajak hanya memiliki satu NPWP.

Fungsi dan Manfaat Memiliki NPWP.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki banyak fungsi dan manfaat, di antaranya:

- a. Menjadi sarana administrasi perpajakan.
- b. NPWP juga menjadi salah satu usaha untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan administrasi perpajakan.
- c. Selain itu, bisa pula untuk mendapatkan pelayanan umum dan pengurusan dokumen-dokumen untuk wajib pajak yang memiliki usaha.

Orang yang memiliki NPWP maka akan memperoleh kemudahan untuk administrasi perpajakan. Selanjutnya, pemegang nomor ini memiliki kemudahan dalam pengajuan pengurangan pembayaran pajak dan permohonan restitusi. Mempunyai NPWP juga bermanfaat untuk pemotongan pajak yang lebih kecil. Oleh karena itu, bagi yang tidak memiliki NPWP, pemotongan pajak atas penghasilan akan dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dibanding yang memiliki NPWP. Sehingga dengan mempunyai NPWP, wajib pajak bisa mendapatkan kemudahan untuk mengurus administrasi di berbagai instansi, karena beberapa instansi mewajibkan untuk melampirkannya.

Jenis-Jenis NPWP

Jenis NPWP terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. NPWP Pribadi.

NPWP Pribadi ini diberikan kepada setiap individu yang punya penghasilan. NPWP Pribadi Orang pribadi: diberikan kepada wajib pajak yang belum menikah dan suami

sebagai kepala keluarga. Hidup berpisah: diberikan kepada perempuan yang sudah kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah atau cerai berdasarkan keputusan hakim. Pisah harta: diberikan kepada suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena secara tertulis menghendaki berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan juga penghasilan. Memilih terpisah: diberikan kepada perempuan yang sudah kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta. Perempuan yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berbeda dengan suaminya. Warisan belum terbagi: NPWP merupakan satu kesatuan subjek pajak pengganti atau menggantikan mereka yang berhak atau ahli waris.

b. NPWP Badan.

NPWP Badan diberikan kepada badan usaha atau perusahaan yang punya penghasilan. NPWP Badan: diberikan kepada sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha. Joint operation: diberikan kepada bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan atas nama bentuk kerja sama operasi. Kantor perwakilan perusahaan asing: diberikan kepada Wajib Pajak perwakilan asing atau kantor perwakilan perusahaan asing. Bendahara: diberikan kepada bendahara pemerintah yang membayar gaji, honor, tunjangan, upah dan juga pembayaran lainnya. Selain itu diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Penyelenggara kegiatan: diberikan kepada pihak empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan sebuah kegiatan.

Siapa yang Wajib Memiliki NPWP.

Tidak semua warga Indonesia wajib memiliki NPWP. Orang atau perusahaan yang wajib memiliki NPWP adalah yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut adalah persyaratan subjektif sehingga wajib memiliki NPWP: Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; Warisan yang belum

terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selain persyaratan subjektif, ada persyaratan objektif bagi pihak yang wajib memiliki NPWP. Syarat objektif yang dimaksud adalah mempunyai penghasilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam wajib membayarkan pajak. Kewajiban membayar pajak ini sendiri hanya dibebankan kepada mereka yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dilansir dari Online Pajak, orang dengan penghasilan di bawah PTKP tidak wajib untuk membayar atau melaporkan pajak. Pun tidak wajib mempunyai NPWP. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/62abdd8e00765/definisi-npwp-fungsi-jenis-dan-manfaatnya-seperti-ktp>.

Pemadanan NIK dengan NPWP.

Pada tanggal 30 Juni 2024 yang lalu merupakan batas akhir pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak Orang Pribadi secara mandiri. Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan sistem inti perpajakan (*core tax system*) terbaru.

Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyelaraskan data identitas penduduk yang tertera pada NIK dengan data wajib pajak pada NPWP. Sehingga dengan pemadanan ini, maka setiap wajib pajak akan memiliki satu identitas tunggal (*single identity number/SIN*) terintegrasi, yaitu NIK sebagai NPWP. Perubahan NPWP menjadi NIK ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021). Dimulai dari tahun 2022, pemerintah memberi tambahan waktu 6 bulan untuk melakukan pemadanan NPWP menjadi NIK dari batas akhir sebelumnya pada 31 Desember 2023 menjadi 30 Juni 2024 sesuai dengan PMK nomor 136/PMK.03/2023. Menurut data DJP-Kemenkeu per tanggal 28 Juni, tersisa 674 ribu yang masih belum dipadankan dari total 74,45 juta NIK yang ada.

Tujuan Pemadanan NIK-NPWP, terhitung mulai 1 Juli, NIK diimplementasikan sepenuhnya sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit bagi wajib pajak (WP) badan dan instansi pemerintah. Apa sebenarnya tujuan dilakukan pemadanan NIK-NPWP diantaranya:

1. Meningkatkan Akurasi Data, Dengan mengintegrasikan NIK dan NPWP, pemerintah dapat memastikan bahwa data wajib pajak yang tercatat lebih akurat dan *up-to-date*. Hal ini akan mengurangi potensi kesalahan dalam perekaman dan pengolahan data perpajakan.

2. Memudahkan Pelayanan dan Administrasi, Integrasi data akan memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan. Tidak perlu lagi mengurus dokumen dengan identitas yang berbeda-beda karena sudah terintegrasi dalam satu nomor identitas. Proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien dengan adanya integrasi ini. Pemerintah juga dapat lebih optimal melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat.

Metode.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang Tim kami lakukan bersifat Monodisiplin. Bentuk PKM ini disajikan dengan menggunakan metode *exploration*, yaitu menggali satu atau beberapa aspek khusus suatu topik. Kemudian mendiskusikannya, mempelajari, mencari alternatif solusinya dan mengevaluasi. Selain itu juga digunakan metode *sharing of ideas*, *prosedure two ways dialogue*, yaitu suatu diskusi yang selaras dengan memberikan pandangan-pandangan di mana seluruh peserta bisa ikut berpartisipasi.

Sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan gambaran terkait Pemadanan NIK dengan NPWP bagi warga khususnya UKM Hen's Food yang berada di wilayah Perumahan Villa Pertiwi Blok S1 No. 5 Jl. Masjid Annuriah, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok yang diwajibkan oleh pemerintah saat ini. Objek Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah anggota UKM Hen's Food. Dipilihnya atau ditentukan lokasi ini karena kebanyakan anggota atau pemilik UKM belum memadankan Nik dengan NPWP.

Pelaksanaan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema: "Pemadanan NIK dengan NPWP bagi warga khususnya UKM Hen's Food yang berada di wilayah Perumahan Villa Pertiwi Blok S1 No. 5 Jl. Masjid Annuriah, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok pada tanggal 4 Agustus 2024. Pelaksanaan Kegiatan ini dapat dikategorikan menjadi 2 kegiatan: yaitu Pra- pelaksana kegiatan dan pelaksana kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Pra – Pelaksana Kegiatan PKM

Sebelum dilakukannya kegiatan pelaksanaan PKM, maka diperlukan persiapan dalam bentuk aktivitas-aktivitas pra pelaksana yang telah dimulai sejak Juni 2024 dengan

melakukan koordinasi dari Kelompok UKM Selanjutnya dilakukan koordinasi secara komprehensif berupa pertemuan-pertemuan serta survei-survei dengan *timeline* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pra - Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1	Survei Pendahuluan			
2	Pengumpulan Data Sasaran Kegiatan			
3	PenelitianKepustakaan			
4	PelaksanaanKegiatan			
5	PembuatanLaporan			

Tahapan kegiatan Pra-Pelaksanaan meliputi Survei Pendahuluan, Pengumpulan Data Sasaran Kegiatan, Penelitian Kepustakaan, Pelaksanaan Kegiatan, dan Pembuatan Laporan. Kegiatan di mulai dengan melakukan survei pendahuluan dan pengumpulan data sasaran kegiatan di Kelurahan Sukamaju sekaligus melakukan wawancara terkait pelatihan untuk menentukan sasaran peserta pelatihan. Survei pendahuluan dan pengumpulan data sasaran dilakukan selama bulan Juni 2024 . Selanjutnya, selama bulan Juli 2024 dilakukan penelitian Kepustakaan secara komprehensif dalam rangka mempersiapkan materi pelaksanaan PKM.

Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan referensi yang terkait dengan topik PKM. Pada Agustus 2024, dilakukan pelaksanaan PKM yang berlokasi di Kelurahan Sukamaju, kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pelaksanaan Kegiatan berisi pemaparan materi dari pada penyaji dan diteruskan dengan dialog 2 arah berupa diskusi dan tanya jawab antara penyaji materi dengan peserta pelatihan. Tahap akhir yaitu penyusunan Laporan Kegiatan PKM. Setelah dilakukan pelaksanaan PKM, maka diperlukan Laporan atas implementasi PKM yang telah dilakukan dalam bentuk Laporan yang membahas Kegiatan PKM secara keseluruhan. Laporan PKM ini mencakup latar belakang diadakannya PKM, metode pelaksanaan, hingga kesimpulan dan saran dari PKM yang telah diadakan terhadap warga UKM khususnya UKM Hen's Food Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok.

Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM dari STIE – Bisnis Indonesia dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2024 yang dihadiri oleh kurang lebih 9 peserta yang merupakan staf dan anggota UKM Hen's Food di Perumahan Villa Pertiwi, Jln. Masjid Anuriyah, Blok S1 No. 5, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok, para dosen STIE-Bisnis Indonesia dan mahasiswa/mahasiswi STIE – Bisnis Indonesia. Adapun susunan acara kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2
Susunan acara PKM

Waktu	Acara
14:00 – 14:15	Persiapan PKM
14:15 – 14:20	Pembukaan oleh MC
14:20 – 14:25	Sambutan oleh Wakil Ketua I STIE – Bisnis Indonesia, Bapak Sutardi, S.E., M.M.
14:25 – 14:30	Sambutan oleh Perwakilan Peserta Pelatiha PKM Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong
14:30 – 15:30	Pemaparanmateri PKM tentang pepadanan NIK dengan NPWP
15:30 – 16:30	Sesi Tanya jawab
16:30	Penutup

Pelaksanaan kegiatan PKM dimulai dengan persiapan PKM seperti mengisi daftar hadir yang dilakukan oleh seluruh peserta PKM. Selanjutnya acara dimulai dengan pembukaan oleh MC. Selanjutnya acara diteruskan dengan sambutan oleh Wakil ketua I STIE – Bisnis Indonesia, dan Perwakilan Peserta Pelatihan PKM Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Kemudian *highlight* dari kegiatan PKM ini yaitu pemaparan materi PKM oleh Tim PKM STIE -Bisnis Indonesia.

Langkah-langkah pepadanan NIK dan NPWP:

1. Akses laman www.pajak.go.id.
2. Pilih "Login" dan masukkan 15 digit NPWP serta kata sandi.
3. Ketik kode keamanan (*captcha*) dan klik "Login".
4. Pilih menu "Profil" dan masukkan NIK sesuai KTP.
5. [Cek validitas NIK dan klik "Ubah Profil"](#)

Setelah dijelaskan langkah-langkah pemadanan NIK dengan NPWP maka selanjutnya diteruskan dengan praktek pemadanan NIK dengan NPWP, Sesi tanya jawab. Kemudian rangkaian acara ditutup oleh MC. Selama kegiatan berlangsung, peserta kegiatan PKM antusias mengikuti kegiatan PKM dari awal hingga selesainya acara pemadanan tersebut, khususnya para peserta yang berkeinginan untuk memadankan NIK dengan NPWP. PKM berlangsung menarik karena terdapat interaksi dua arah antara penyaji materi dengan peserta. Kemudian peserta diberikan pendampingan dan pengarahan secara khusus agar materi yang diberikan dapat dipahami dan dipraktikkan dengan baik sampai berhasil memadankannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pelaksanaan Pemadanan NIP dengan NPWP.

Pelaksanaan kegiatan pada Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM dari STIE – Bisnis Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada warga atau pelaku usaha agar memahami pentingnya arti pemadanan NIK dengan NPWP yang sudah programkan oleh pemerintah agar tertib dalam perpajakan dan memudahkan untuk mengurus keperluan dikemudian hari. Pada pelaksanaan pemadanan NIK dengan NPWP tersebut tinggal mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah diberikan antara lain: a) Akses laman www.pajak.go.id; b) Pilih "Login" dan masukkan 15 digit NPWP serta kata sandi; c) Ketik kode keamanan (*captcha*) dan klik "Login"; d) Pilih menu "Profil" dan masukkan NIK sesuai KTP. E) [Cek validitas NIK dan klik "Ubah Profil](#), dsengn demikian maka proses pemadanan antara NIK dengan NPWP telah berhasil/selesai. Berdasarkan kegiatan PKM yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa warga khususnya UKM Hen's Food Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berhasil memadankan NIK dengan NPWP.

Pemadanan NIK-NPWP ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan satu identitas tunggal, proses administrasi pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

Pentingnya Pemadanan NIK dengan NPWP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, bahwa proses pemadanan NIK sebagai NPWP sebenarnya tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Pada dasarnya kebanyakan data yang ada

merupakan hasil dari pemadanan secara otomatis oleh DJP yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Akan tetapi, wajib pajak tetap harus melakukan pemadanan NIK dan NPWP sendiri karena terdapat data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi secara mandiri. “Selanjutnya, pemerintah juga mengimbau supaya wajib pajak melaksanakan pengecekan sendiri ke dalam sistem djponline apakah NIK mereka dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan,” (Dwi kepada Kompas.com, Jumat 14/6/2024). “Agar tidak terjadi kendala dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan ke depannya,” pungkasnya.

SIMPULAN DAN SARAN.

Simpulan.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim PKM STIE – Bisnis Indonesia maka dapat ditarik simpulan bahwa masih dibutuhkannya sosialisasi dan pemahaman tentang arti pentingnya pemadanan NIK dengan NPWP agar wajib pajak lebih mudah untuk mengakses pada Link www.pajak.go.id. Sehingga dalam rangka pengembangan usahanya UKM Hen's Food maka tidak akan mengalami kendala tentang pelaporan perpajakan. Oleh karena jika UKM taat pajak akan memudahkan kerja sama dengan unit-unit pemerintah terutama dalam hal pendanaan dan pemasaran dari hasil produknya.

Saran.

Adapun saran ialah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan UKM khusus Hen's Food untuk sadar dan taat pajak
2. Menginformasikan kepada Ukm lain agar segera memadankan NIK dengan NPWP agar memudahkan sistem perpajakan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA.

Kperes No 96 tahun 2018, tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah (PMK-112)
Perpres No 83 Tahun 2021 tentang Nomor Induk Kependudukan
Perpres Nomor 26 tahun 2009, tentang Nomor Induk Kependudukan, (NIK)
PP Nomor 24 tahun 2018, tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
www.pajak.go.id

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PKM



Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (UKM Hen's Food, Villa Pertiwi Blok S1 No.5 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat).